

**ANALISIS DIGITAL MATURITY DI KANTOR DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

**Aditiya Perkasa
NIM.07011282126079**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS DIGITAL MATURITY DI KANTOR DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana-S-1 Administrasi Publik**

Oleh:

**ADITIYA PERKASA
NIM.07011282126079**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2025

Pembimbing



Junaidi, S.IP., M.Si

NIP. 197603092008011009

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



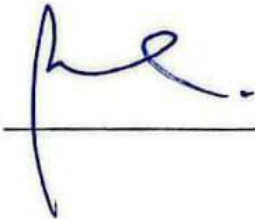
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
ANALISIS DIGITAL MATURITY DI KANTOR DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG

Skripsi
Oleh :
ADITIYA PERKASA
NIM.07011282126079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 25 Juli 2025

Pembimbing:

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009



Penguji:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125989121001



2. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001




Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Mengetahui


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditiya Perkasa
NIM : 07011282126079
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul “Analisis Digital Maturity Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.” Adalah benar-benar karya dari saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan maupun melakukan pengutipan yang tidak sesuai dengan aturan dan etika keilmuan yang saat ini berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Prabumulih, 15 Juli 2025



Aditiya Perkasa

NIM.07011282126079

MOTO PERSEMBAHAN

Kesadaran Akan Ketidaktahuan Adalah
Bentuk Pertama Dari Kebijaksanaan

-Socrates-

Atas Ridho Allah, Skripsi Ini Saya
Persembahkan Untuk:

1. Kedua Orangtua Saya
2. Ketiga Saudaraku
3. Dosen Pembimbing Saya,
Bapak Junaidi, S.IP., M.Si
4. Seluruh Dosen Fakultas
Ilmu Sosial Dan Politik
5. Teman-Teman Seperjuangan
Dan Semua Orang Yang Tidak
Bisa Disebutkan Satu Per Satu
6. Almamater Tercinta

ABSTRAK

Kematangan digital adalah tingkatan dari seberapa baik suatu organisasi termasuk organisasi dari pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktivitas kerjanya. Semakin matang sistem digital disuatu organisasi maka semakin efektif dan efisien pula organisasi tersebut dalam memanfaatkan sistem digital untuk menunjang kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kematangan digital yang ada di kantor DPRD Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan model teori E-Government Digital Maturity dari Hillanger dan Belanger (2001), yang mencakup lima dimensi utama yaitu informasi, komunikasi dua arah, transaksi, integrasi, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digital di DPRD Kota Palembang belum dapat dikatakan matang karena sistem digital yang ada masih terbatas pada informasi dan transaksi namun belum dapat memberikan secara cepat pada pembaharuan informasi pada beberapa platform digital yang digunakan dan belum dapat memberikan sistem digital yang memungkinkan penyerapan aspirasi dan komunikasi antara masyarakat dengan anggota DPRD secara digital.

Kata Kunci: Kematangan Digital, Pemerintahan Elektronik, Sistem Digital

Pembimbing



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Palembang, Juli 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



ABSTRACT

Digital maturity is the level of effectiveness of an organization, including government organizations, in utilizing digital technology in its work activities. The more mature an organization's digital systems, the more effective and efficient it is in utilizing digital systems to support its performance. This study aims to measure the extent of digital maturity at the Palembang City Regional People's Representative Council (DPRD) office. This study employed a qualitative descriptive approach, utilizing the E-Government Digital Maturity theoretical model by Hillanger and Belanger (2001), which encompasses five main dimensions: information, two-way communication, transactions, integration, and participation. The results indicate that the digital system at the Palembang City DPRD is not yet mature because it is still limited to information and transactions, but cannot provide rapid information updates on several digital platforms. It cannot yet provide a digital system that enables the digital absorption of aspirations and communication between the public and DPRD members.

Keywords: *Digital Maturity, E-Government, Digital System*

Advisor



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Palembang, Juli 2025
Head of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Digital Maturity Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang”. Adapun skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan berdasarkan kurikulum Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Penulis juga secara khusus memberikan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Trison Suwandri dan Ibu Suraya Lanita yang memberikan kontribusi besar pada banyak hal dalam hidup saya termasuk dalam hal ini pendidikan.
2. Saudara saya yang juga turut berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung selama perjalanan saya menempuh perkuliahan.
3. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih sudah memberikan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
10. Kepada Seluruh Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangannya. Dengan ini penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari semua pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Prabumulih, 22 Juli 2025



Aditiya Perkasa

NIM.07011282126079

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Elektronik Government.....	8
2.1.2 Maturity e-Government.....	9
2.1.3 Model Maturity e-Government.....	10
2.2 Penelitian Terdahulu	14
2.3 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Definisi Konsep.....	22

3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.5 Informan Penelitian	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Teknik Keabsahan Data	27
3.9 Sistematika Penulisan	28
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang	31
4.1.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palembang	31
4.1.3 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Palembang	32
4.2 Informan Penelitian	38
4.3 Hasil Penelitian	39
4.3.1 Informasi	40
4.3.2 Komunikasi Dua Arah.....	50
4.3.3 Transaksi Digital.....	59
4.3.4 Integrasi.....	61
4.3.5 Partisipasi	65
4.4 Pembahasan	72
4.4.1 Informasi	73
4.4.2 Komunikasi Dua Arah.....	74
4.4.3 Transaksi	75
4.4.4 Integrasi.....	76
4.4.5 Partisipasi	77
BAB V Kesimpulan dan Saran	78
5.1 Kesimpulan	78

5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan (Skala 1-5) ..	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3 Fokus Penelitian	23
Tabel 5 Informan Penelitian	38
Tabel 6 Rekap Hasil dan Penemuan Penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Website DPRD Kota Palembang	5
Gambar 2 Model Maturity Digital Laynee Dan Lee (2001)	11
Gambar 3 Kerangka Berpikir	21
Gambar 4 Kantor DPRD Kota Palembang.....	29
Gambar 5 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palembang.....	31
Gambar 6 Profil Sosial Media dan Website DPRD Kota Palembang.....	42
Gambar 7 Sosial Media DPRD Kota Palembang	46
Gambar 8 Website dan Youtube Resmi DPRD Kota Palembang	49
Gambar 9 Surat Masuk Permohonan Audiensi	53
Gambar 10 Fitur Komunikasi Pada Website DPRD Kota Makasar	54
Gambar 11 E-Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta.....	58
Gambar 12 Katalog Elektronik.....	60
Gambar 13 Website DPRD Provinsi Dki Jakarta	64
Gambar 14 Website DPRD Provinsi Dki Jakarta (e-reses)	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Dosen Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Proposal Penelitian	85
Lampiran 3 Lembar Revisi Seminar Proposal	87
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	89
Lampiran 5 Lembar Revisi Ujian Skripsi.....	91
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Di Sekretariat DPRD Kota Palembang.....	92
Lampiran 7 Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 8 Matriks Hasil Wawancara	96
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian	123

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
ICT	: Information and Communication Technology
OECD	: Economic Co-Operation and Development
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Digital
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
WAN	: Wide Area Network

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era digital hampir semua negara berlomba-lomba melakukan transformasi digital tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar aturan dari penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital juga tercermin dalam *Road Map* Menteri komunikasi dan informasi Indonesia 2021-2024 yang memiliki 4 fokus utama dalam mewujudkan transformasi digital yang terdiri dari infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan Masyarakat digital. Transformasi digital sendiri telah menjadi strategi utama bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang di era modern (Eka et al., 2025)

Pemerintahan digital yang kemudian lebih dikenal sebagai e-government menjadi sesuatu yang penting untuk diprioritaskan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi pemerintahan. Menurut Bank Dunia Bhatanagar & Deane, 2004 dalam (Basir & Syamsiar, 2023) E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Hal ini menjadi alasan utama agar pemerintah

segera meninggalkan sistem tradisional dan seiring perkembangan teknologi untuk segera bertransformasi menuju sistem digital.

Penerapan SPBE selalu diberikan penilaian setiap tahunnya dimaksudkan agar setiap Instansi Pusat dan pemerintah Daerah memiliki bahan evaluasi agar penerapannya semakin baik. Berdasarkan data dari laporan evaluasi SPBE Tahun 2024 pada instansi pusat dan daerah 2024 menunjukkan data penilaian SPBE untuk provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan
(Skala 1-5)

No	Nama Instansi	Indeks
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	3,62
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,55
3	Pemerintah Kota Palembang	3,51
4	Pemerintah Kota Prabumulih	3,37
5	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,29
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	3,09
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00
8	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,94
9	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,71
10	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,66
11	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,64
12	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,62
13	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,61
14	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,54
15	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,40
16	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,38
17	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,34
18	Pemerintah Kab. Lahat	2,33

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPBE 2024

Tabel diatas menggambarkan indeks SPBE disetiap daerah di provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Pemerintah Daerah dan 1 Pemerintah Provinsi. Adapun indeks SPBE Kota Palembang yang berada pada angka 3,51 dari 5. Sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang seharusnya perlu meningkatkan kematangan digital agar angka indeks SPBE meningkat lebih tinggi, terlebih kota Palembang sebagai ibu kota hanya berada diperingkat 3 tertinggal dari kabupaten Musi Banyuasin diperingkat pertama dengan nilai 3,62.

Seluruh lembaga dan instansi pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam meningkatkan indeks SPBE melalui kematangan digital. Dalam konteks ini kematangan digital merujuk pada kemampuan organisasi pemerintah daerah untuk memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk merealisasikan tujuan organisasi secara efisien. Penentuan tingkat kematangan digital OPD menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam proses transformasi digital (Aslanova & Kulichkina, 2020) dan (Wernicke et al., 2023) dalam (Syuhada et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga maupun dinas yang ada dalam suatu pemerintah kota memiliki peran penting dalam meningkatkan indeks SPBE pemerintah kota melalui kematangan digital.

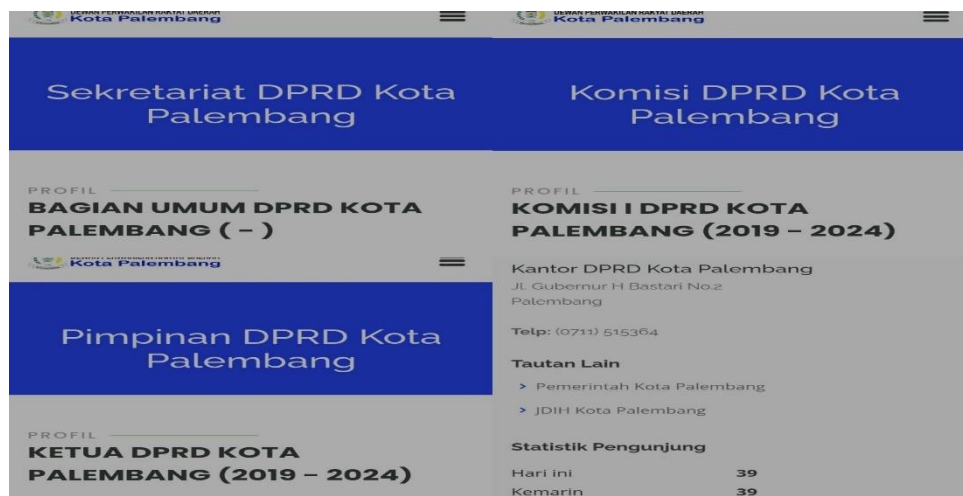
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yang juga merupakan salah satu lembaga yang ada dalam pemerintah kota Palembang tentu harus ikut bertanggung jawab menjadi lembaga yang turut serta membantu mewujudkan arahan Berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 yang telah disepakati salah satunya dengan menerapkan pemerintahan digital. Peraturan Wali Kota Palembang No

27 Tahun 2023 menjadi dasar bagi semua lembaga pemerintahan yang ada di Kota Palembang agar mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital (SPBE).

Fakta bahwa indeks SPBE kota Palembang Berada di angka 3,51 menjadi sinyal kuat bagi lembaga DPRD Kota Palembang sebagai salah satu lembaga daerah dalam pemerintahan Kota Palembang agar harus terus mengevaluasi agar sistem pemerintahan digital kota Palembang meningkat termasuk pada sistem pengadaan barang dan jasa secara digital (e-procurement) dan situs-situs digital yang dimiliki DPRD Kota Palembang agar perlu lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu , pentingnya penilaian kematangan digital bagi lembaga DPRD Kota Palembang untuk memberikan Gambaran masalah apa yang perlu diatasi dan segera dievaluasi bagi lembaga terkait.

Dalam pelaksanaannya, dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan DPRD Kota Palembang terlihat belum maksimal dalam melaksanakan arahan Berdasarkan aturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pertama instansi DPRD Kota Palembang tidak memiliki bidang khusus yang berisi orang-orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan mengenai pengelolaan sistem digital. Dalam penilaian kematangan digital penting untuk memperhatikan spesialisasi pekerjaan. Pengelolaan sistem digital harus menjadi bidang yang dikelola oleh suatu bagian khusus dalam tangga birokrasi, karena sistem digital merupakan bidang yang cukup kompleks dan memerlukan orang dengan keahlian khusus agar memberikan output yang maksimal sebagaimana yang dijelaskan oleh Stephen dan Mary (2013) dalam (Cahyani et al., 2019), spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas-tugas pekerjaan yang terpisah-pisah. Dalam spesialisasi pekerjaan, setiap pekerja harus fokus terhadap satu aktifitas pekerjaan saja dan bukan keseluruhannya. Spesialisasi pekerjaan ini penting untuk meningkatkan output dari para pekerja.

Gambar 1 Website DPRD Kota Palembang



Sumber: Diolah penulis Berdasarkan website DPRD Kota Palembang, 2025

Kedua, minimnya fitur dan pembaharuan konten informasi pada situs-situs digital yang disediakan oleh DPRD Kota Palembang. Gambar diatas menunjukkan website DPRD kota Palembang pertanggal 13-Februari-2025 masih menunjukkan data periode 2019-2024. Gambar diatas juga menunjukkan kurangnya informasi yang disampaikan dilihat dari tidak adanya data pejabat sekretariat DPRD kota Palembang dan kurangnya ketersediaan email atau fitur untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Masyarakat. Pada dasarnya website digital yang baik Menurut (Solis, 2011) haruslah mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang bahkan dapat membangun sebuah hubungan yang bersifat emosional dengan *audience*. Pembaharuan konten dan kelengkapan fitur dalam sebuah website digital agar dapat merangkul semua Masyarakat haruslah menjadi fokus utama bagi sebuah instansi pemerintah termasuk DPRD Kota Palembang.

Di era digital tentu saja penelitian mengenai kematangan digital suatu organisasi menjadi topik yang cukup diminati kalangan peneliti. Misalnya penelitian kematangan digital yang fokus meneliti kematangan digital suatu aplikasi digital yang digunakan suatu organisasi (Yulistiar & Kriswibowo, 2024). Ditemukan juga

penelitian kematangan digital yang menilai kematangan digital Berdasarkan aspek SPBE (Setiawan et al., 2023) dan (Hidayah & Almadani, 2022) Lalu ada juga penelitian yang fokus pada sebuah implementasi program yang dikaitkan dengan kematangan digital (Affan et al., 2023) kemudian tidak ditemukan penelitian kematangan digital pada DPRD suatu daerah, penelitian mengenai DPRD biasanya berfokus pada pengaruh lingkungan kerja (Septayuda & Apriyanti, 2024) atau kinerja DPRD (Kariem & Sabillah, 2024).

Teori model kematangan digital juga sudah sering digunakan dalam berbagai macam penelitian seperti teori digital maturity 5.0 (Syuhada et al., 2024) lalu model teori kematangan digital baik dari laynee dan lee, Hiller dan Belanger, PeGi (Pemeringkatan e-government) dan Fietkiewicz, Mainka & Stock sudah pernah digunakan namun seringkali meneliti dinas-dinas dipemerintahan dan kelurahan atau kecamatan (Rusnita et al., 2023) dan (Noman & Emanuel, 2024) serta model PeGi seringkali digunakan dalam bentuk penelitian kuantitatif (Sopiandi et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa model kematangan digital seringkali digunakan pada objek penelitian yang cenderung pada instansi dibawah Lembaga eksekutif berupa dinas-dinas pemerintahan dan kelurahan atau kecamatan dan belum pernah dilakukan pada lembaga yang secara teknis bertanggung jawab langsung dengan Lembaga legislatif seperti DPRD yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Ditemukan juga model kematangan digital Hiller dan Belanger seringkali digunakan pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan menjadi penelitian kualitatif pertama mengenai kematangan digital pada lembaga besar seperti DPRD dan juga yang pertama dilakukan di kota Palembang karena peneliti ingin lebih menekankan pada aspek-aspek non teknis seperti hubungan dan kemampuan antar pegawai serta

penyebab dan akibat terjadinya masalah yang diidentifikasi yang cukup kompleks dan sulit diterjemahkan melalui angka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana *Digital Maturity* Di Kantor DPRD Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana *Digital Maturity* Di Kantor DPRD Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih Secara teoritis maupun Secara praktis.

1. Manfaat Teoritis, manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu berkontribusi dalam memperluas khazanah ilmu administrasi publik yang tentu saja terkait dengan penguatan kelembagaan dan juga sebagai referensi bagi penelitian yang mungkin ada dimasa depan.
2. Manfaat Praktis, Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khususnya Kota Palembang sebagai bahan evaluasi untuk menguatkan instansinya sebagai sebuah lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, A., Hasanbasri, M., Yoki Sanjaya, G., dan Manajemen Kesehatan, K., Kedokteran, F., Masyarakat, K., Keperawatan, dan, Gadjah Mada, U., & Kesehatan Masyarakat, I. (2023). Konsistensi Penilaian Kematangan Digital Pada Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Dinas Kesehatan Kabupaten. *Journal of Information Systems for Public Health*, VIII(3), 18–31.
- Aslanova, I. V., & Kulichkina, A. I. (2020). *Digital Maturity: Definition and Model*. 138(Mtde), 443–449. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.073>
- Basir, S., & Syamsiar. (2023). *Konsep dan Implementasi E-Government: Perwujudan Pelayanan Publik yang Demokratis*. CV Bintang Semesta Media.
- Cahyani, A., Firdaus, M. A., & Rinda, R. T. K. (2019). Job Specialization Dan Job Enlargement Terhadap Efektivitas Kerja. *Manager : Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.32832/manager.v2i1.1861>
- Eka, D., Novienty, R. F., Nurmandi, A., & Younus, M. (2025). Application of Digital Maturity Framework in Improving the Performance of Public Sector Organizations in Indonesia. *JKAP; Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 29(1), 9213. <https://doi.org/10.22146/jkap.104081>
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 49–67. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i2.2680>
- Hiller, J. S., & Bélanger, F. (2001). Privacy Strategies for Electronic Government. *Center for Global Electronic Commerce*, 40. <http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf>
- Kariem, M. Q., & Sabillah. (2024). Profil Pendidikan Politisi terhadap Kinerja di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 58–62. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3733>
- Noman, E. P., & Emanuel, A. W. R. (2024). E-Government Maturity Analysis Using the Layne and Lee, Hiller and Belanger, and Spbe Models. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, 9(2), 284–291. <https://doi.org/10.33480/jitk.v9i2.5110>
- Rusnita, W. C., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2023). Evaluasi Program E-Kelurahan Di Kota Padang Menggunakan E-Government Maturity Model. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(2), 185–196. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i2.2626>
- Septayuda, I., & Apriyanti, R. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Semangat KerjaKaryawan Pada Kantor DPRD Kota Palembang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 1424–1432. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>

- Setiawan, A., Sahlan, M. F. F., & Syam, S. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government Kota Palopo Menggunakan E-Government Maturity Model. *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)*, 1(2), 59–66. <https://doi.org/10.20895/jasmed.v1i2.1345>
- Solis, B. (2011). *Engage : The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*. John Wiley & Sons.
- Sopiandi, I., Susanti, D., & Wahyuno. (2022). Pengukuran Pemeringkatan Tata Kelola E-Government Analisis Dengan Metode Pegi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. *INFOTECH Journal*, 8(1), 1–4. <https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609>
- sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syuhada, M. H., Basnella, R., & Zahraty, W. (2024). Analisis Kematangan Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Menggunakan Digital Maturity Model 5.0. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 125–146. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4475>
- Wernicke, B., Stehn, L., Sezer, A. A., & Thunberg, M. (2023). Introduction of a digital maturity assessment framework for construction site operations. *International Journal of Construction Management*, 23(5), 898–908. <https://doi.org/10.1080/15623599.2021.1943629>
- Yulistiar, F. W., & Kriswibowo, A. (2024). Evaluation of Customer Service through PLN Mobile Application in the Framework of Electronic Government Maturity Model in Sidoarjo Customer Service Implementation Unit. *Journal La Sociale*, 5(4), 971–987. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1226>